

PENDAMPINGAN PENGURUSAN SERTIFIKASI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT) DAN SERTIFIKASI NIB PADA UMKM DI DESA TALOK, KECAMATAN TUREN, KABUPATEN MALANG

Widhistya Kartikaningrum^{1,*}, Ahmad Zaki Mubarak², Mochamad Arif Zainul Fuad³, Abu Bakar Sambah⁴, Desi Dwi Prianti⁵, Ereko Hadiwijoyo⁶

¹ *Jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya, Malang*

² *Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya, Malang*

³ *Jurusan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Malang*

⁴ *Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Universitas Brawijaya, Malang*

⁵ *Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, Malang*

⁶ *Jurusan Tanah Universitas Brawijaya, Malang*

ABSTRACT

Industries in various fields, especially in the food sector, have developed rapidly from various types of scales, one of which is the small to medium scale industry or what is often known as MSMEs. The number of MSMEs in Indonesia reaches 99.9% of the total number of business actors in Indonesia. Therefore, the government issued regulations related to product distribution permits in the form of PIRT certification and NIB certification. Food MSMEs in Talok Village are still rarely certified by PIRT and NIB. This condition can have an impact on decreasing competitiveness and consumer confidence in the product. Therefore, in this program, assistance in the management of PIRT and NIB certification is carried out for Food MSMEs in Talok Village. The purpose of this program is to increase awareness of business actors in Talok Village regarding the importance of having distribution permits in the form of PIRT and NIB and to increase partner understanding regarding the procedures for applying for PIRT and NIB certification. The implementation method of this program is divided into three stages, namely pre-implementation, implementation, and post-implementation. The pre-stage planning activities are carried out, the implementation stage is carried out with mentoring activities and the post-stage monitoring and evaluation are carried out. In this program, knowledge transfer has been carried out regarding the procedures for obtaining PIRT and NIB certifications as well as assisting the process of applying for certification. The application process is carried out online through the OSS application or you can visit the Health Office directly to get directions..

Keywords: *Food Industry, Malang, Setification, SMEs.*

ABSTRAK

Industri di berbagai bidang terutama pada bidang pangan mengalami perkembangan secara pesat dari berbagai jenis skala, salah satunya yaitu skala industri kecil hingga menengah atau yang sering dikenal dengan UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari jumlah keseluruhan pelaku usaha yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan regulasi terkait izin edar produk berupa sertifikasi PIRT dan sertifikasi NIB. UMKM pangan yang ada di Desa Talok masih jarang yang telah tersertifikasi PIRT dan NIB. Kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk. Maka dari itu, pada program ini dilakukan pendampingan pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB bagi UMKM Pangan di Desa Talok. Tujuan dari program ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha di Desa Talok terkait pentingnya kepemilikan izin edar berupa PIRT dan NIB serta dapat meningkatkan pemahaman mitra terkait dengan prosedur pengajuan sertifikasi PIRT dan NIB. Metode pelaksanaan dari program ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu prapelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Tahap pra dilakukan kegiatan perencanaan, tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan pendampingan dan tahap pasca dilakukan monitoring serta evaluasi. Pada program ini telah dilakukan transfer ilmu pengetahuan mengenai prosedur pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB serta membantu proses pengajuan sertifikasi. Proses pengajuan dilakukan secara daring melalui aplikasi OSS maupun dapat berkunjung secara langsung ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan pengarahan.

Kata Kunci: *Industri Pangan, Malang, Sertifikasi, UMKM*

* Korespondensi penulis: Widhistya Kartikaningrum, email kartikaningrum22@gmail.com

** Mahasiswa tingkat Sarjana (S1)

1. PENDAHULUAN

Usaha di bidang pangan merupakan salah satu usaha yang mengalami perkembangan secara pesat sehingga memiliki prospek yang sangat tinggi untuk dijalankan. Hal ini dikarenakan pangan termasuk kebutuhan primer bagi konsumen [1]. Tingginya kebutuhan konsumen akan pangan menyebabkan persaingan para pelaku usaha di bidang pangan semakin kompetitif karena banyaknya usaha baru yang muncul di pasaran, khususnya dalam skala UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Selain itu, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2014 menyatakan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari jumlah keseluruhan pelaku usaha yang ada di Indonesia [2]. Oleh karena itu, Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjamin keamanan pangan dan mengawasi seluruh produk pangan yang beredar di pasaran. Salah satu upaya pemerintah dalam menjamin produk pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi masyarakat secara luas yaitu dengan menetapkan izin edar berupa izin pangan industri rumah tangga (PIRT) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan bentuk jaminan ke-NIB-an suatu produk pangan berupa izin NIB yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI.

Dalam kenyataannya, pelaku usaha produk pangan masih banyak yang belum mempunyai izin PIRT dan NIB, hal ini disebabkan oleh beragam faktor, yaitu 1) pengetahuan pelaku usaha yang masih minim terkait dengan jaminan keamanan dan ke-NIB-an pangan dan legalitas layak edar tersebut, 2) terjadi kekhawatiran terkait masalah biaya yang perlu dikeluarkan dalam pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB, 3) adanya izin PIRT dan NIB dianggap tidak memiliki urgensi yang tinggi, 4) proses pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB dianggap sulit untuk dilakukan, 5) belum memahami prosedur pengurusan izin legalitas produk layak edar dan faktor-faktor lainnya [1]. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya masalah yang muncul dari produk pangan yang beredar di masyarakat. Menurut [3], produk pangan yang tidak memiliki izin edar dari pemerintah berisiko tinggi mengakibatkan permasalahan kesehatan bagi konsumen. Hal ini dikarenakan banyak produk yang beredar masih belum memiliki keterangan produksi secara jelas serta keterangan kadaluwarsa dari produk tersebut, dan rendahnya kesadaran para pelaku usaha untuk memproduksi produk pangan dalam kondisi yang higienis serta penggunaan bahan baku yang aman dikonsumsi [4], [5].

Desa Talok merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan banyaknya potensi wisata dan oleh-oleh pendukung pariwisata yang ditawarkan. Banyaknya potensi wisata dari desa ini menjadikannya berpeluang untuk dijadikan sebagai desa dengan jumlah pelaku usaha terutama UMKM yang cukup tinggi. Letaknya yang strategis menjadikan desa ini memiliki prospek yang sangat baik untuk mendirikan usaha pangan skala menengah. Produk pangan yang dihasilkan dari desa ini dapat dijadikan sebagai ciri khas untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Berdasarkan hal tersebut, terdapat aneka usaha pangan yang diproduksi oleh UMKM di Desa Talok. Namun, masih banyak UMKM pangan di desa tersebut yang belum memiliki izin edar PIRT dan NIB.

Banyaknya UMKM pangan di Desa Talok yang belum memiliki izin edar berupa PIRT dan NIB dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya daya saing produk di pasaran dan mengurangi daya tarik serta kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Hal ini tentu akan menjadi masalah bagi para pelaku usaha di desa tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari masalah tersebut terjadi yaitu dengan melakukan pengurusan pengajuan sertifikasi PIRT dan NIB oleh para pemilik UMKM pangan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk pendampingan pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB bagi para pemilik UMKM pangan di Desa Talok. Adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku usaha di Desa Talok terkait pentingnya kepemilikan izin edar berupa PIRT dan NIB serta dapat meningkatkan pemahaman mitra terkait dengan prosedur pengajuan sertifikasi PIRT dan NIB.

2. METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian melalui kegiatan pendampingan pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB dilakukan dengan pendekatan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Pendekatan ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian yang dilakukan melibatkan masyarakat dan pengabdian secara langsung dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, sehingga tercapainya tujuan akhir yang dikehendaki [6]. Program pengabdian ini dilakukan di lokasi mitra yaitu di Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pelaksanaan program dilakukan selama kurang lebih satu bulan, yaitu pada bulan Juli hingga Agustus 2022. Pendampingan pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB ditujukan untuk pelaku UMKM pangan yang belum memperoleh sertifikasi PIRT dan NIB.

Kegiatan pendampingan pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap prapelaksanaan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan. Tahap pra dapat disebut juga dengan tahap perencanaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini yaitu (1) melakukan koordinasi dengan pemilik UMKM pangan di Desa Talok untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh mitra dalam mengurus sertifikasi PIRT dan NIB, (2) melakukan diskusi secara intensif untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam mengatasi seluruh permasalahan dan kendala yang dihadapi mitra selama pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB. Kemudian, kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan yaitu memberikan edukasi terkait dengan prosedur pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB untuk meningkatkan pemahaman mitra. Pada tahap pascapelaksanaan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas seluruh kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya untuk dijadikan perbaikan ke depannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pendampingan pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB dilakukan dengan melalui tiga tahap yaitu tahap pra-pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca pelaksanaan. Dalam melaksanakan tahapannya program pendampingan pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB dilakukan pada tiga UMKM pangan yang berada di Desa Talok. Berikut rincian pelaksanaan setiap tahapan program pendampingan pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB.

1. Tahap Pra-Pelaksanaan

Tahap prapelaksanaan merupakan tahap persiapan sebelum kegiatan program pendampingan pengurusan PIRT dan NIB dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini yang pertama yaitu koordinasi dengan pemilik UMKM pangan di Desa Talok untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh mitra dalam mengurus sertifikasi PIRT dan NIB. Koordinasi dilakukan dengan melakukan kunjungan pada Pemerintah Desa dan BUMDES di Desa Talok dan melakukan wawancara terkait dengan kendala yang dialami oleh UMKM pangan dalam pengurusan sertifikasi NIB, dimana kegiatan koordinasi ini dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan BUMDES Desa Talok
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Kegiatan dalam tahap pra-pelaksanaan yang selanjutnya yaitu melakukan diskusi secara intensif untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam mengatasi seluruh permasalahan dan kendala yang dihadapi mitra selama pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB. Selain itu, dalam tahap pra-pelaksanaan dilakukan pengumpulan data UMKM yang belum memiliki sertifikat PIRT dan NIB serta dilakukan pemilihan narasumber yang tepat untuk memberikan pelatihan, dimana narasumber dapat berasal dari Dinas Kesehatan Wilayah Kabupaten Malang yang bernama Ibu Reni Wahyu Pramesti, S.Gz. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi didapatkan bahwa terdapat beberapa kendala terkait pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB dengan solusi yang diusulkan seperti dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Kendala/Permasalahan dan Solusi terkait Pengurusan Sertifikasi PIRT dan NIB

Kendala/Permasalahan	Solusi
Sertifikasi PIRT : 1. Belum dilaksanakan pelatihan oleh Dinas Kesehatan sehingga UMKM belum memiliki sertifikat pelatihan	Sertifikasi PIRT : 1. Pelaksanaan kegiatan pelatihan pengurusan sertifikasi PIRT maupun NIB pada seluruh UMKM di Desa

	Talok dengan meminta pemateri dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
--	---

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap lanjutan dari program pendampingan pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB. Setelah dilakukan identifikasi masalah dan diberikan usulan terkait solusi permasalahan, kegiatan dalam tahap pra pelaksanaan yang berikutnya yaitu memberikan edukasi terkait dengan prosedur pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB untuk meningkatkan pemahaman mitra. Pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan mengundang UMKM yang berada di Desa Talok baik yang telah memiliki sertifikasi PIRT dan NIB maupun yang belum memiliki sertifikat PIRT dan NIB. Undangan yang diberikan pada masyarakat Desa Talok disebarluaskan melalui bantuan perangkat desa. Pelaksanaan kegiatan pelatihan pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB dilakukan pada tanggal 25 Juli 2022 bertempat di Balai Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Peserta yang menghadiri pelatihan sejumlah 40 orang perwakilan dari 40 UMKM di Desa Talok, dimana kegiatan ini dapat dilihat pada **Gambar 2**.



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan sebagai Upaya Edukasi Pengurusan PIRT dan NIB
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Peserta yang menghadiri kegiatan pelatihan berasal dari UMKM pangan maupun no-pangan. Pemberian edukasi terkait dengan prosedur pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB dilakukan dengan menjelaskan tahapan pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB serta syarat yang perlu dipersiapkan yang dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Persyaratan Pendaftaran Sertifikasi PIRT dan NIB

Sertifikasi PIRT	Sertifikasi NIB
1. Fotokopi KTP Pemilik UMKM	1. Fotokopi KTP
2. Surat Keterangan Domisili UMKM dari Kecamatan	2. Fotokopi Izin Usaha
3. Pas Foto Ukuran 3x4 Sebanyak 2 Lembar	3. Pas Foto Ukuran 3x4 Sebanyak 2 Lembar
4. Denah Lokasi dan Denah Bangunan UMKM	

3. Tahap Pasca Pelaksanaan

Pada tahap pasca pelaksanaan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat dilakukan perbaikan dimasa yang akan datang. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelatihan dilakukan dengan memberikan kuesioner terhadap pelaku UMKM terkait dengan pengurusan sertifikat PIRT dan NIB. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari diadakannya

pelatihan pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB terhadap kesadaran dan perspektif UMKM pada proses pengurusan dan pentingnya sertifikasi PIRT dan NIB. Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa pelatihan memberikan pengetahuan dan dorongan pada beberapa UMKM untuk melakukan pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB. Selain itu, hasil evaluasi dari kegiatan yang dilakukan adalah ketertarikan pelaku UMKM dalam proses pengurusan sertifikasi baik PIRT maupun NIB masih kurang, dimana hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaku UMKM yang hadir masih sejumlah 50% dari total jumlah pelaku UMKM di Desa Talok. Hal ini mengakibatkan masih banyak pelaku UMKM di Desa Talok yang belum mendapatkan edukasi proses pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan program pendampingan pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB dilakukan upaya peningkatan kesadaran pemilik UMKM pangan di Desa Talok terkait dengan pentingnya kepemilikan izin edar PIRT dan NIB. Selain itu, program yang dilakukan juga merupakan upaya dalam peningkatan pemahaman mitra atau UMKM pangan di Desa Talok terkait dengan prosedur pengajuan sertifikasi PIRT dan NIB. Program yang dijalankan memuat tiga tahapan yaitu tahap pra-pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca pelaksanaan yang saling terkait. Hasil dan Evaluasi dari program yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi acuan bagi program-program sejenis terutama dalam melakukan edukasi pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB.

Pelaksanaan kegiatan pada program pendampingan pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB memiliki beberapa kendala terkait dengan antusias partisipasi dari masyarakat, dimana hal ini dimungkinkan akibat dari kondisi pasca pandemi Covid-19 yang menurunkan minat partisipasi masyarakat terutama dalam hal pelatihan. Hal ini kedepannya dapat diantisipasi dengan melakukan pendekatan secara personal terhadap masyarakat sekitar. Selain itu, dapat dilakukan pelatihan dengan lingkup masyarakat yang lebih kecil contohnya pelatihan dilakukan dalam lingkup dusun sehingga diharapkan masyarakat lebih partisipatif.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang khusus kepada seluruh tim pengabdian masyarakat KKNT dan Pengabdian Masyarakat Strategis Desa Talok, Universitas Brawijaya yang telah berpartisipasi aktif dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan ini sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, saya mengucapkan terima kasih kepada mitra kegiatan ini yaitu seluruh jajaran Pemerintah Desa Talok telah bekerjasama sehingga kegiatan ini dapat berlangsung.

6. DAFTAR RUJUKAN

- [1] D. A. Kurniawan and R. Y. Astuti, "Khadimul ummah," *Khadimul Ummah J. Soc. Dedication*, vol. 1, no. 2, pp. 93–101, 2018.
- [2] A. H. Putra, "Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia," *J. Anal. Sociol.*, vol. 5, no. 2, pp. 40–52, 2016.
- [3] B. Hermanu, "Implementasi Izin Edar Produk PIRT melalui Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu," *Pros. Semin. Nas. Multidisiplin Ilmu Unisbank ke-2 "Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengemb. IPTEKS untuk Mewujudkan Pembang. Nas. Semesta Berencana sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Glob.*, vol. 1945, no. 1, pp. 424–435, 2016.
- [4] N. Qonita and D. Andesta, "Pengendalian Kualitas Menggunakan Metode Statistical Quality Control (SQC) Pengendalian Kualitas Menggunakan Metode Statistical Quality Control (SQC) pada Produk Kerupuk Ikan UD . Zahra Barokah," no. April, 2022, doi: 10.35308/jopt.v8i1.5285.
- [5] E. Herlina, F. Haris, E. Prabowo, and D. Nuraida, "Jurnal Fokus Manajemen Bisnis ANALISIS PENGENDALIAN MUTU DALAM MENINGKATKAN," vol. 11, no. September, pp. 173–188, 2021.
- [6] W. Paas, C. San Martín, B. Soriano, M. K. van Ittersum, M. P. M. Meuwissen, and P. Reidsma, "Assessing future sustainability and resilience of farming systems with a participatory method: A case study on extensive sheep farming in Huesca, Spain," *Ecol. Indic.*, vol. 132, no. December 2020, 2021, doi: 10.1016/j.ecolind.2021.108236.